

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingginya kegiatan perindustrian di Provinsi Banten membuat kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Akibatnya kegiatan perindustrian yang berada di sekitar pesisir pantai Teluk Banten ramai mengadakan reklamasi pantai.<sup>1</sup> Berdasarkan konsepsi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebijakan lainnya, serta merujuk pada hasil survei lapangan dan pemetaan, maka lokasi pengembangan KEK di Provinsi Banten yang paling sesuai adalah di wilayah Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Kramatwatu. Selanjutnya, wilayah pengembangan KEK di ketiga kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang ini disebut KEK Bojonegara. Kemudian, dengan memanfaatkan hasil analisis GIS, diketahui bahwa deliniasi dan luas areal pengembangan KEK Bojonegara adalah

---

<sup>1</sup> Violita Liyubayina, “Analisis Dampak Reklamasi Teluk Banten Terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi (Studi Kasus: Kecamatan Bojonegara)”, *Planesa* Volume 9, Nomor 1, Mei 2018, h. 37-38.

sekitar 2.834,4 hektar, yang tersebar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, 2009; Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Pertama, lahan milik PT Pelindo II seluas 668,87 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang industri seperti pelabuhan, *refinery*, PLTU Suralaya dan lain-lain. Kedua, lahan milik PT Banten Java Persada seluas 90,40 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri. Ketiga, lahan milik PT Jababeka Group seluas 900,00 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri.<sup>3</sup>

Perubahan panjang garis pantai Teluk Banten pada tahun 2007 sampai dengan 2013 garis pantai bertambah secara signifikan sebesar 9,02 km. Panjang garis pantai tahun 2007 adalah 38,87 km, sedangkan panjang garis pantai tahun 2013 adalah 47,89 km. Garis pantai 2013 juga terbentuk akibat adanya akresi dan abrasi. Penambahan panjang garis pantai pada tahun 2007-2013 diakibatkan oleh reklamasi pantai untuk kegiatan

---

<sup>2</sup> Alkadri, "Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Banten", *Sains Dan Teknologi Indonesia* Volume 13, Nomor 1, April 2011, h. 9.

<sup>3</sup> Alkadri, "Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...", h. 9.

industri dan pembangunan Pelabuhan Bojonegara. Sedangkan penambahan luas lahan pantai atau akresi tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 seluas 31,26 hektar dengan laju rerata perubahan luas pantai sebesar 5,21 hektar/tahun. Sedangkan pengurangan lahan pantai atau abrasi seluas 297,76 hektar dengan laju rerata abrasi tahun 2007 sampai dengan 2013 seluas 49,63 hektar/tahun.<sup>4</sup>

Reklamasi merupakan salah satu upaya penyediaan lahan untuk berbagai keperluan kota seperti pemekaran kota, penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya populasi manusia khususnya di kawasan pesisir sehingga menimbulkan berkurangnya lahan akibat pembangunan. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan guna memenuhi kebutuhan manusia akan ruang yang semakin tinggi. Demi memenuhi kebutuhan ruang, manusia berfikir untuk mencari lahan baru guna menunjang aktivitas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Erni Kusumawati, dkk, "Studi Perubahan Garis Pantai di Teluk Banten Menggunakan Citra Satelit Landsat Multitemporal", *Journal of Marine Research* Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, h. 631.

<sup>5</sup> Violita Liyubayina, "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Banten....", h. 38.

Kawasan ini disibukkan oleh berbagai aktivitas nelayan, transportasi, pengembangan pantai untuk pemukiman, dan industri. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan dan perubahan garis pantai, polusi dari darat dan abrasi pantai.<sup>6</sup> Keterbatasan lahan untuk kegiatan industri di sepanjang Teluk Banten telah mendorong kegiatan reklamasi di garis pantai Teluk Banten salah satunya di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

Reklamasi memiliki dampak terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai sehingga akan menimbulkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai dan berpotensi gangguan lingkungan. Selain dampak terhadap lingkungan reklamasi pantai juga berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Berkurangnya hasil tangkapan akibat ekosistem laut yang rusak, berkurangnya lahan tangkapan ikan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Erni Kusumawati, dkk, "Studi Perubahan Garis Pantai di Teluk Banten...", h. 630.

<sup>7</sup> Tarmidi, nelayan di Desa Margagiri. Wawancara tentang dampak reklamasi, 20 Januari 2021.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari reklamasi di Teluk Banten ini adalah berkurangnya kawasan hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan potensi perikanan laut. Selain itu dampak reklamasi juga mempengaruhi karakteristik dan dinamika arus Teluk Banten. Hal tersebut ditandai dengan adanya kawasan pantai yang mengalami abrasi mulai dari kawasan Tonjong Kelurahan Terate sampai dengan Kelurahan Banten. Dengan kawasan yang hilang diperkirakan telah mencapai 50 hektar selama kurun waktu 10 tahun.<sup>8</sup>

Namun di sisi lain reklamasi pantai dapat berdampak baik sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi.<sup>9</sup> Perencanaan reklamasi harus disinkronisasikan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota harus memperhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan

---

<sup>8</sup> Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), *Status Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2011*, (Serang, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2011).

<sup>9</sup> Neni Faryadi, masyarakat di Desa Margagiri. Wawancara tentang dampak reklamasi, 20 Januari 2021.

politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.<sup>10</sup>

Mengingat sifat alamiah wilayah pesisir dan aktivitas masyarakat pesisir yang dinamis serta kompleks, pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir mengharuskan pendekatan secara terpadu, rasional, dan optimal yang mencakup peran serta masyarakat di dalamnya. Selanjutnya pendekatan yang tidak memperhatikan interaksi antara prinsip ekologi dan perilaku (budaya) masyarakat, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berakibat pada perusakan wilayah pesisir. Akar permasalahan ini berasosiasi dengan faktor sosial-ekonomi-budaya dan bio-fisik yang mempengaruhi kondisi wilayah pesisir.

Dalam menyikapi perubahan-perubahan ini masyarakat Margagiri melakukan upaya untuk beradaptasi. Beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat Margagiri adalah berusaha meningkatkan sumber daya manusia atau kualitas mereka,

---

<sup>10</sup> Violita Liyubayina, "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Banten...", h. 38.

melakukan berbagai rekayasa sumber penghasilan dari bidang perikanan, dan mencari sumber pendapatan lain non-perikanan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam menyikapi perubahan-perubahan dari dampak proyek reklamasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian terhadap masyarakat pesisir di Proyek Reklamasi Teluk Banten. Dengan demikian penelitian ini diberi judul **“Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Proyek Reklamasi Teluk Banten (Studi Kasus di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Proyek Reklamasi Teluk Banten di Desa Margagiri?

2. Bagaimana kapasitas adaptasi masyarakat pesisir Desa Margagiri dalam menyikapi Proyek Reklamasi Teluk Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Proyek Reklamasi Teluk Banten di Desa Margagiri.
2. Untuk menganalisis kapasitas adaptasi masyarakat pesisir dalam menyikapi Proyek Reklamasi Teluk Banten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dalam menyikapi proyek reklamasi Teluk Banten di kawasan Industri Bojonegara Kabupaten Serang.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

### a. Bagi Peneliti

Agar peneliti atau penulis dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan laporan penelitian, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam merencanakan strategi untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka dan bertahan hidup terhadap perubahan lingkungannya.

c. Bagi Akademisi

Bagi penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik dari kalangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak-pihak lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang reklamasi di Teluk Banten dalam berbagai aspek sudah banyak dikaji oleh penulis. Namun demikian, sejauh pengetahuan peneliti, reklamasi di Desa Margagigi dan kapasitas adaptasi masyarakat Margagiri dalam menyikapi proyek reklamasi di Teluk Banten belum pernah ada yang mengkaji secara spesifik dan komprehensif.

Dalam berbagai literatur tentang reklamasi dan kapasitas masyarakat, kita dapat menemukan beberapa penulis dan peneliti yang sudah melakukan penelitian serius, baik yang bersifat kajian literatur maupun penelitian lapangan.

*Pertama*, skripsi Asmayanti Sudirman pada tahun 2018, yang berjudul “Hubungan Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi

Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Lasusua (Studi Kasus: Kelurahan Lasusua dan Desa Ponggiha)” di UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh reklamasi pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan mengetahui persepsi masyarakat mengenai adanya reklamasi pantai ini. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi, jenis penelitian ini menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif sehingga jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan survei.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang saya kaji yaitu penelitian bukan hanya sebatas melihat perubahan pada aspek-aspek sosial-ekonomi namun juga akan membahas bagaimana kapasitas masyarakat dalam menyikapi perubahan-perubahan sosial-ekonomi setelah adanya proyek reklamasi. Selain itu juga metode yang saya gunakan berbeda yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif.

---

<sup>11</sup> Asmayanti Sudirman, Skripsi: “Hubungan Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Lasusua (Studi Kasus: Kelurahan Lasusua dan Desa Ponggiha)”, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

*Kedua*, skripsi Ibnu Mustaqim pada tahun 2015, berjudul “Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian yang didapatkan dari skripsi tersebut adalah aspek perubahan sosial-ekonomi masyarakat pesisir akibat pembangunan pelabuhan Muara Angke yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dampak sosial-ekonomi muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program, atau atau kebijaksanaan yang diterapkan di masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang saya kaji yaitu penelitian bukan hanya sebatas melihat perubahan pada aspek-aspek sosial-ekonomi namun juga akan membahas bagaimana kapasitas masyarakat dalam menyikapi perubahan-perubahan sosial-ekonomi setelah adanya proyek reklamasi.

---

<sup>12</sup> Ibnu Mustaqim, Skripsi: “Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)” (Jakarta: UIN Jakarta, 2015).

*Ketiga*, artikel di jurnal yang ditulis Nonik Susanti pada tahun 2018, yang berjudul “Upaya *Greenpeace* Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta” dalam jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018. Dalam penelitian ini Nonik Susanti menganalisis *Greenpeace* sebagai salah satu organisasi internasional non pemerintah juga mempunyai fungsi sebagai komunikator. Dalam hal reklamasi teluk Jakarta, *Greenpeace* berupaya mengkampanyekan penolakan terhadap reklamasi tersebut.<sup>13</sup>

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nonik Susanti yaitu untuk mengatasi permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta ini menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan pihak berwenang. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis adalah bagaimana masyarakat mengatasi permasalahan reklamasi tersebut dengan cara mereka sendiri tanpa bantuan pihak ketiga.

---

<sup>13</sup> Nonik Susanti, “Upaya *Greenpeace* Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta” jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April, Tahun 2018.

*Keempat*, artikel di jurnal yang ditulis Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana pada tahun 2019, yang berjudul “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan” dalam Jurnal Tata Loka Volume 21 Nomor 4, November 2019, 689-704. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian ijin reklamasi kepada pihak swasta, Pemprov DKI Jakarta tidak mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2014 (sebelumnya UU No. 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana sebelum proyek reklamasi dilaksanakan. Kenyataannya, kegiatan reklamasi berjalan terlebih dahulu namun kajian kelayakan dan dampak lingkungan belum dilakukan. Protes dari berbagai kalangan masyarakat mengakibatkan proyek reklamasi dimoratorium melalui putusan pengadilan, hingga adanya Perda baru sebagai payung hukum reklamasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang saya kaji yaitu penelitian bukan hanya sebatas

---

<sup>14</sup> Insan Harapan dan Nana Suryana, “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan” Jurnal Tata Loka Volume 21 Nomor 4, November 2019, 689-704.

mengkaji terkait regulasi atau kebijakan pemerintah namun juga akan membahas bagaimana aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi dampak-dampak reklamasi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Kapasitas Masyarakat**

Secara kebahasaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kapasitas” mengacu pada pemaknaan mengenai data tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia atau kemampuan yang maksimal. Kapasitas menurut Milen dimaknai sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk melakukan fungsi yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Sedangkan Brown, LaFond & Macintyre mendefinisikan “kapasitas” sebagai kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang telah direncanakan dan digambarkan sebagai proses dan hasil.<sup>15</sup>

Kapasitas juga berkembang secara bertahap dan multi-dimensional. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soeprapto

---

<sup>15</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Modul Pelatihan Bidang Inovasi untuk Masyarakat; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat*, (Jakarta: Pusdiklat Kemenristekdikti, 2019), h. 3.

yaitu kapasitas lebih merujuk kepada hasil (*outcome*) atau kondisi yang ingin dicapai, sedangkan peningkatan kapasitas merupakan seluruh proses untuk mencapai hasil (*outcome*). Di antara pengertian tentang kata “kapasitas” dapat diambil dua makna yang tersirat yaitu pemaknaan secara luas yang mengacu pada pengembangan dan makna yang sempit mengacu pada latihan-latihan. Kapasitas bercirikan dimensi dinamis daripada statis karena kapasitas merupakan proses yang berkelanjutan sebagai bentuk bahwa kapasitas individu, organisasi atau sistem tidak pernah lengkap atau dalam keadaan yang sempurna tetapi membutuhkan pembaruan.<sup>16</sup>

### **Konsep Peningkatan Kapasitas**

Konsep peningkatan kapasitas sampai saat ini masih menyisakan perbedaan pendapat dari beberapa ahli baik dalam penyebutan maupun pendefinisian. Sebagian ahli menyebut peningkatan kapasitas sebagai *capacity building*, *capacity development* atau *capacity strengthening* yang merujuk pada suatu pengembangan kemampuan yang sudah ada.

---

<sup>16</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Modul Pelatihan Bidang Inovasi untuk Masyarakat...*, h. 3.



Sementara pendapat lain menyebut sebagai proses kreatif untuk membangun suatu kapasitas yang belum nampak. Soeprapto dalam Ilato menjelaskan bahwa sebagian ilmuwan memaknai peningkatan kapasitas sebagai *capacity building*, *capacity development* atau *capacity strengthening* yang mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).<sup>17</sup>

*Capacity building* (pengembangan kapasitas) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah. Yakni *efficiency*, dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana

---

<sup>17</sup> Ilato, *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 51.

mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Dalam lingkup pembelajaran, Morrison memandang peningkatan kapasitas sebagai suatu proses untuk mendorong, menggerakkan, melakukan perubahan multi-level di dalam individu, kelompok, organisasi dan sistem. Idealnya peningkatan kapasitas berusaha memperkuat kapabilitas individu dan organisasi agar dapat menghadapi lingkungan yang terus berubah. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses dan bukan produk.<sup>18</sup> Secara khusus, peningkatan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-level yang berusaha menghubungkan antara ide dan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas dalam definisi ini dipandang sebagai pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan.

Pendapat yang berbeda yaitu peningkatan kapasitas masyarakat adalah konsep utama sebuah proses peningkatan kapasitas dan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan advokasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Modul Pelatihan Bidang Inovasi untuk Masyarakat...*, h. 4.

<sup>19</sup> Siti Arieta. 2017. *Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perbatasan Sebagai Strategi Integratif Pengelolaan Konflik (Studi Kasus Dinamika Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas)*. Online.

Peningkatan kapasitas masyarakat sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dari konsep mengenai masyarakat dan peningkatan kapasitas. Sedangkan secara umum peningkatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan (anggota dan masyarakat) untuk menentukan pilihan, perubahan, perbaikan dan pembaharuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat adalah upaya penciptaan kemakmuran, bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan namun lebih dari itu, yaitu menciptakan nilai bagi manusia.

### **Kapasitas Adaptasi**

Kapasitas adaptasi merupakan kemampuan sebuah sistem dalam menghadapi keterpaparan. Kapasitas adaptasi merupakan kemampuan sistem untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim dengan mengurangi potensi kerusakan dengan memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi, teknologi, akses informasi terkait dengan perubahan iklim dan kemampuan institusi dalam beradaptasi.<sup>20</sup>

---

<http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/PeningkatanKapasitas-Masyarakat-Perbatasan-Anambas-Siti-Arieta.pdf> . Diakses 22 Desember 2020.

<sup>20</sup> Kumalasari, "Kapasitas Adaptasi terhadap Kerentanan Perubahan Iklim di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas Semarang" *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(4), 476-487, 2014.

Pada umumnya, kapasitas adaptasi merupakan kemampuan sistem dalam menghadapi dampak buruk akibat gangguan.<sup>21</sup> Kapasitas adaptasi tergantung pada proses pembelajaran sebelumnya dengan kerentanan dengan mengembangkan strategi menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Kapasitas adaptasi masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya ekonomi, teknologi, informasi dan keterampilan, infrastruktur, tersedianya lembaga yang kuat dan terorganisasi dengan baik, pemerataan akses menuju sumber daya. Salah satu penentu kapasitas adaptasi adalah adanya kemampuan pelaku adaptasi.<sup>22</sup>

## **2. Masyarakat Pesisir**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu dan

---

<sup>21</sup> Hilma Qoniana Purifyningtyas dan Holi Bina Wijaya, "Kajian Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Pekalongan terhadap Kerentanan Banjir Rob." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2016, 81-94*

<sup>22</sup> Baharinawati W. Hastanti dan Purwanto, "Analisis Keterpaparan, Sensitivitas dan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Terhadap Kekeringan di Dusun Pamor, Kradenan, Grobogan" *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, (2020), 17(1): 1-19.*

kesamaan tertentu.<sup>23</sup> August Comte mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.<sup>24</sup>

Definisi wilayah pesisir menurut Dahuri dalam Syamsir Salam, sehingga saat ini belum ada definisi yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.<sup>25</sup> Dengan kata lain wilayah pesisir berarti tanah dasar berpasir di pantai di tepi laut.

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir, mempunyai mata pencaharian dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut, misalnya nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, pengelola ikan, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik atau pekerja pertambangan dan energi di wilayah pesisir, pemilik atau

---

<sup>23</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 17 September 2021.

<sup>24</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 31.

<sup>25</sup> Syamsir Salam dan Amir Fadilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 199.

pekerja industri maritim, misalnya galangan kapal dan *coastal and engineering*.

Berdasarkan definisi di atas, maka masyarakat pesisir diartikan sebagai sekumpulan orang yang bertempat tinggal di tepi pantai dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumber daya laut dan pantai tersebut.

### **Karakteristik Masyarakat Pesisir**

Sifat dan karakter masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan mereka, seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan oleh mereka. Karena sifat dari usaha-usaha mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Secara struktural, masyarakat nelayan dan kegiatan ekonomi perikananannya, seperti digambarkan Firth memiliki kemiripan dengan sistem ekonomi petani. Walaupun karakteristik aktivitas produksi nelayan dan petani berbeda, tetapi dalam beberapa hal terdapat kesamaan yang bersifat umum, seperti

kerentanan secara ekonomi terhadap timbulnya ketidakpastian yang berkaitan dengan musim-musim produksi.<sup>26</sup>

Karakteristik ini menjadi karakteristik yang paling mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut, sebaliknya pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Kondisi ini mempunyai implikasi besar pula terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya.

Kondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan nelayan dan juga petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat vertikal, yang terwujud dalam hubungan patron-klien. Menurut Scott dalam Kusnadi menyatakan bahwa hubungan patron-klien merupakan kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di mana seseorang yang kedudukan sosialnya (*patron*) lebih tinggi

---

<sup>26</sup> Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, (Bandung, Humaniora Utama Press, 2000), h. 23.

menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan, atau keduanya kepada orang yang kedudukannya (*client*) lebih rendah.<sup>27</sup>

Karena keadaan yang buruk, maka para nelayan kecil buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau para pedagang pengumpul. Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterkaitan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan tersebut. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah menjadi alat mendominasi dan eksploitasi.

Komunitas pesisir mempunyai keunikan dibandingkan dengan komunitas lain yaitu ketergantungannya pada sumberdaya pesisir. Ketergantungan pada sumberdaya adalah ketika tatanan sosial, mata pencaharian dan stabilitas suatu komunitas merupakan fungsi langsung dari produksi sumberdaya dan ekonomi lokal. Dalam konteks daerah pesisir di Asia, komunitas

---

<sup>27</sup> Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial...*, h. 18.



pesisir paling baik dipahami sebagai tergantung bukan hanya pada satu sumberdaya tetapi pada keseluruhan ekosistem. Sumberdaya pesisir bisa beragam dan semakin stabil ekosistemnya semakin lenting juga komunitas pesisir tersebut.<sup>28</sup>

Aturan-aturan yang digunakan umumnya timbul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aturan-aturan dan kebijakan ini kemudian ditetapkan dan dikukuhkan sebagai hukum adat yang disepakati bersama. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut juga langsung diaplikasikan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri.

Sistem pengelolaan di atas dapat berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan

---

<sup>28</sup> Nurmala K. Panjaitan, dkk, “Kapasitas Adaptasi Komunitas Pesisir pada Kondisi Rawan Pangan Akibat Perubahan Iklim (Kasus Sebuah Komunitas Nelayan di Jawa Barat)”, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2016, h. 282.

yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama.<sup>29</sup>

### 3. Reklamasi

Reklamasi memiliki beberapa pengertian. Istilah “reklamasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurukan (tanah), atau juga usaha memperluas pertanian (tanah) atau dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Sedangkan mereklamasi berarti membuka tanah untuk digarap.<sup>30</sup> Dari segi bahasa reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reclamation* yang berarti pekerjaan memperoleh tanah. Jadi reklamasi pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan laut.

Menurut Sekretariat Direktorat Jendral Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum,<sup>31</sup> reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sesuai

---

<sup>29</sup> Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia, 2000), h.7-8.

<sup>30</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 17 September 2021.

<sup>31</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum)

dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata.

Pengertian terkait reklamasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 23 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengungkapkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Pengertian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Dengan demikian, reklamasi adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan

yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Sedangkan reklamasi pantai dapat diartikan sebagai usaha pembentukan lahan baru baik yang menyatu dengan wilayah pantai atau terpisah dari pantai dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka pemanfaatan sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

### **Tujuan Reklamasi**

Reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi dilakukan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi memiliki kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Tujuan utama dari kegiatan reklamasi kawasan pesisir pantai adalah menjadikan kawasan berair yang tidak berguna menjadi kawasan baru yang digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan pembangunan. Pada dasarnya kegiatan reklamasi pesisir

pantai adalah kegiatan yang mengubah wilayah perairan pantai menjadi wilayah daratan. Secara teknis kegiatan reklamasi mengubah tinggi atau level muka air laut pada batas-batas tertentu untuk dikeringkan atau diadakan pengurugan.<sup>32</sup>

Tujuan reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.<sup>33</sup>

Pemanfaatan sumber daya kawasan pesisir pantai dengan cara kegiatan reklamasi pada dasarnya melakukan proses perubahan bentuk lingkungan dari lingkungan alami menjadi lingkungan buatan guna kebutuhan hidup manusia. Kegiatan reklamasi ditempuh atau dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan

---

<sup>32</sup> Udjipto Pawitro, "Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan" Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015, h. 149.

<sup>33</sup> *Modul Terapan, Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 44/PRT/M/2007)*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, h. 16.

kawasan lingkungan alam yang kurang bermanfaat menjadi lingkungan buatan manusia yang lebih produktif dan bermanfaat.

### **Dampak Reklamasi**

Kegiatan reklamasi di satu sisi dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penyediaan sarana-sarana perumahan, permukiman, perdagangan, industry hingga pariwisata. Namun di sisi lain pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem kawasan pesisir pantai.

Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembangunan kawasan pesisir pantai di Indonesia. Di antara masalah itu adalah pencemaran pada kawasan air laut. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>35</sup>

Selanjutnya adalah kerusakan fisik habitat. Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah adalah ekosistem terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya 6,20 %, kondisi rusak 41,78 % , kondisi sedang 28,30%, dan kondisi baik 23,72 %.<sup>36</sup>

Eksplorasi sumber daya secara berlebihan (*overfishing*) termasuk udang, ikan demersal, palagis kecil, dan ikan karang.

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

<sup>36</sup> Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah" dalam Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 2 April - Juni 2001, h. 146.

Menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena *overfishing* juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan terganggu.

Masalah lainnya yang dapat ditimbulkan adalah abrasi pantai. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai di antaranya adalah proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka) dan aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan (HPH) atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir.<sup>37</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis.<sup>38</sup> Dalam suatu penelitian metode

---

<sup>37</sup> Udjiyanto Pawitro, "Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan" Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015, h. 149.

<sup>38</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 5.



mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan teknik-teknik berikut ini:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>39</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang kapasitas yang dimiliki masyarakat pesisir dalam menyikapi Proyek Reklamasi Teluk Banten di Desa Margagiri.

#### 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Proyek Reklamasi Teluk Banten di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena di kawasan tersebut terdapat proyek reklamasi Teluk

---

<sup>39</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Suaka Media, 2013), cetakan pertama, h. 8.

Banten yang cukup besar sehingga terjadi perubahan sosial-ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian dimulai pada tanggal 17 Februari 2021 – 02 Juni 2021.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

#### a. Observasi

Menurut Supardi observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini saya menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu saya datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini saya langsung mengadakan pengamatan dan melakukan pencatatan

---

<sup>40</sup> Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan : UMSU Press, 2014), h. 65.

<sup>41</sup> Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), h. 72.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h. 310.

terhadap objek penelitian yaitu masyarakat di daerah kawasan Proyek Reklamasi Teluk Banten.

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>43</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang mendalam (*in-depth interview*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>44</sup>

Kegiatan wawancara yang dilakukan pada skripsi ini adalah penulis datang dan mewawancarai beberapa informan meliputi masyarakat dan *stakeholder* di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h. 316.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h. 318.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara adalah 10 orang nelayan di Desa Margagiri, 5 orang masyarakat, serta 1 orang Sekretaris Desa Margagiri.

Penulis mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Penulis melakukan wawancara dengan merekam dan mencatat isi pembicaraan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa arsip data Desa Margagiri tahun 2021, dan dokumentasi pribadi penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan lawan kata sekunder, yang berarti utama, asli atau langsung dari sumbernya. Data

primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data tersebut tidak tersedia dan periset perlu melakukan pengumpulan atau pengadaan data sendiri.<sup>45</sup> Penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan melalui observasi pengamatan langsung, wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data primer merupakan data yang bukan secara langsung dari sumbernya atau data yang telah dikumpulkan pihak lain artinya peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut yang telah dikumpulkan.<sup>46</sup> Data penelitian tersebut berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti, buku-buku, internet, dan sumber lainnya.

---

<sup>45</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), cetakan kedua, h. 38.

<sup>46</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia...*, h. 33.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>48</sup> Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h. 332.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h. 337.

<sup>49</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017), cetakan keempat, h.407-408.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, *pie chart*, pictogram, dan sejenisnya.<sup>50</sup> Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai kapasitas yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Margagiri dalam menghadapi perubahan-perubahan akibat dampak reklamasi Teluk Banten.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h.339.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* ....., h.343.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum proyek reklamasi Teluk Bantendi Kawasan Industri Bojonegara. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang proyek reklamasi Teluk Banten, letak geografis proyek reklamasi Teluk Banten, letak demografis proyek reklamasi Teluk Banten, kondisi masyarakat sekitar proyek reklamasi Teluk Banten, dan regulasi pemerintah terkait proyek reklamasi Teluk Banten.

BAB III membahas tentang kapasitas adaptasi masyarakat terhadap Proyek Reklamasi Teluk Banten yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai perubahan sumber pendapatan masyarakat



pesisir, perubahan pola aktivitas penangkapan masyarakat pesisir, perubahan struktur sosial masyarakat, dan perubahan pola mata pencaharian pada perempuan.

BAB IV menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis mengenai kapasitas masyarakat pesisir dalam proyek reklamasi Teluk Banten dan diuraikan sebagai hasil penelitian. Bab ini akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu proses penyadaran yang dilakukan masyarakat pesisir, proses pengkapasitasan yang dilakukan masyarakat pesisir, proses pendayaan yang dilakukan masyarakat pesisir, faktor pendukung dan faktor penghambat kapasitas masyarakat pesisir dalam proyek reklamasi Teluk Banten.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.